

SKRIPSI
PENGATURAN DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
DI SUMATERA BARAT

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
Hukum*

OLEH:

JILAN FAIHA

2010111066

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H

Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No. Reg: 08/PK V/V/2024

**PENGATURAN DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
DI SUMATERA BARAT**

***REGULATION AND FULFILLMENT OF WOMEN'S REPRESENTATION IN THE
PERMANENT CANDIDATE LIST IN THE 2024 LEGISLATIVE GENERAL ELECTION
IN WEST SUMATRA***

Disusun Oleh
Author

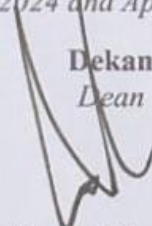
Jilan Faiha
NIM: 2010111066

Program Kekhususan (PK): Hukum Tata Negara (PK V)
Concentration Program (CP): Constitutional Law (CP V)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Oktober
2024 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Minor Thesis was Defended in The Comprehensive Examination Session on October
24th, 2024 And Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

Dekan
Dean



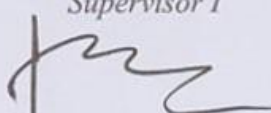
Dr. Ferdi, S.H., M.Hum
Nip 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I



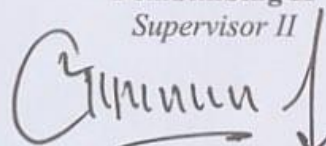
Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
Nip 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I



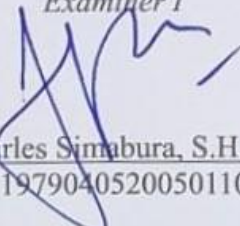
Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H
Nip 198111302010121005

Pembimbing II
Supervisor II



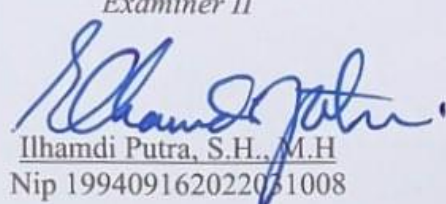
Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M
Nip 198303312015041001

Penguji I
Examiner I




Dr. Charles Simabura, S.H., M.H
Nip 197904052005011005

Penguji II
Examiner II



Ilhamdi Putra, S.H., M.H
Nip 199409162022051008

	No. Alumni Universitas	Jilan Faiha	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 18 Maret 2002 b. Nama Orang Tua : Ferdinandus c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. NIM : 2010111066	f. Tanggal Lulus : 30 Oktober 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan i. IPK : 3,87 j. Alamat : Bukit Gombak, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar	

PENGATURAN DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI SUMATERA BARAT

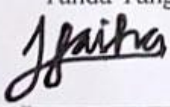
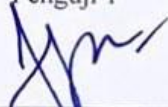
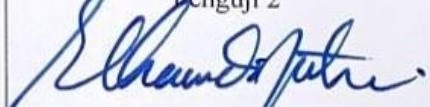
Jilan Faiha, 2010111066, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 165 Halaman, 2024

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa keterwakilan perempuan di dalam daftar calon legislatif paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa pada penghitungan 30% keterwakilan perempuan, jika terdapat dua angka di belakang koma maka dilakukan dua jenis pembulatan yaitu ke atas atau pembulatan ke bawah yang menyesuaikan dengan nilai angka di belakang koma. Penggunaan pembulatan ke bawah ini berdampak pada keterwakilan perempuan menjadi kurang dari 30% pada beberapa daerah pemilihan dengan jumlah calon legislatif 4, 7, 8, dan 11. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penggunaan pembulatan ke bawah pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana dinamika pengaturan batas minimal 30% kuota calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum tahun 2024? *Kedua*, bagaimana pemenuhan hak afirmasi 30% perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilihan umum legislatif di Sumatera Barat? Penelitian ini menggunakan metode empiris yakni mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *pertama*, pengaturan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 mengalami perubahan pada politik hukumnya. *Kedua*, Pemenuhan syarat minimal 30% keterwakilan perempuan di Sumatera Barat dinyatakan memenuhi syarat karena ditundanya pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 oleh KPU sehingga Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 masih berlaku. Namun, jika Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 dilaksanakan pada pemilihan umum Tahun 2024 maka seluruh daftar calon yang melakukan pembulatan ke bawah dinyatakan tidak memenuhi syarat pemenuhan minimal keterwakilan perempuan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 30 Oktober 2024.

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji 1 	Penguji 2 
Jilan Faiha	Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S.H., M.H


Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: Arfiani, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor almnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Jilan Faiha	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang/ 18 March 2002 b. Parent Name : Ferdinandus c. Faculty : Law d. CP : Constitutional Law e. NIM : 2010111066	f. Graduation Date : October 30, 2024 g. Pass Predicate : With Honors h. Length of Study : 4 Years 2 Months i. GPA : 3,87 j. Address : Bukit Gombak, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar	

REGULATION AND FULFILLMENT OF WOMEN'S REPRESENTATION IN THE PERMANENT CANDIDATE LIST IN THE 2024 LEGISLATIVE GENERAL ELECTION IN WEST SUMATRA


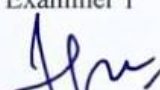
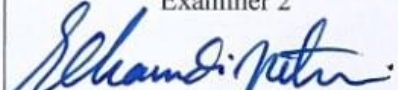
Jilan Faiha, 2010111066, Concentration Program Constitutional Law (CP V), Faculty of Law, Andalas University, 165 Pages, 2024

ABSTRACT

Law Number 7/2017 regulates that women's representation in the list of legislative candidates is at least 30% (thirty percent). The General Election Commission in the General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 Article 8 paragraph (2) regulates that in calculating 30% of women's representation, if there are two numbers behind the comma, two types of rounding are carried out, namely upward or downward rounding which adjusts to the value of the number behind the comma. The use of rounding down has an impact on women's representation being less than 30% in several electoral districts with the number of legislative candidates 4, 7, 8, and 11. This creates legal uncertainty because the use of rounding down in Article 8 paragraph (2) of the General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 is contrary to Article 245 of Law Number 7 of 2017. The formulation of the problems in this study are first, how are the dynamics of setting a minimum limit of 30% quota for female legislative candidates in the 2024 general election? Second, how is the fulfillment of the 30% affirmation right of women in the permanent candidate list in the legislative general election in West Sumatra? This research uses an empirical method, namely observing the interactions and reactions that occur when the norm system works in society. The results of this study reveal that first, the minimum arrangement of 30% women's representation in the list of legislative candidates in the 2024 general election has changed in its legal politics. Second, the fulfillment of the minimum requirement of 30% women's representation in West Sumatra is declared eligible because of the postponement of the implementation of the Supreme Court Decision No. 24 P/HUM/2023 by the KPU so that Article 8 paragraph (2) of KPU Regulation No. 10 Year 2023 is still valid. However, if the Supreme Court Decision No. 24 P / HUM / 2023 is implemented in the 2024 general election, then the entire list of candidates who round down is declared not to meet the minimum requirements for women's representation.

This thesis has been defended in front of the Examining Team and was declared passed on October 30, 2024.

Examiner,

Signature 	Examiner 1 	Examiner 2 
Jilan Faiha	Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S.H., M.H

Know,

Head of the Constitutional Law Department: **Arfiani, S.H., M.H.**


Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

	Faculty/University Officer	
No. Faculty Alumni	Name:	Signature:
No. University Alumni	Name:	Signature: